

## **Belanja Hibah - Pemkot Alokasikan Rp11 Miliar Untuk Hibah Masjid dan Insentif 6.000 Pekerja Guru Mengaji-Imam**



Sumber Gambar: <https://beritakotamakassar.com/berita/2024/03/25/pemkot-alokasikan-rp11-miliar/>

Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran tahun ini sebesar Rp11 miliar yang dialokasikan untuk hibah masjid dan pemberian insentif bagi guru mengaji dan imam masjid. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2024 itu berada di pos anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar Moh Syarief menerangkan, anggaran sebesar Rp11 miliar tersebut akan disalurkan ke 200 masjid serta 6000 pekerja keagamaan, yang terdiri dari guru mengaji, imam masjid, pemandi jenazah, mubalig, dan penghafal Qur'an.

Untuk hibah masjid, kata mantan Kabag Protokol Pemkot Makassar itu, nilai yang akan disalurkan bervariasi. Antara Rp50 juta hingga Rp100 juta, bergantung kebutuhan masing-masing. Masjid yang menerima bantuan hibah tahun ini adalah yang mengajukan proposal permohonan bantuan ke Pemkot Makassar, dan memenuhi syarat untuk mendapatkannya.

“Jadi untuk mendapatkan bantuan dana hibah, pengurus masjid harus mengajukan proposal permohonan bantuan ke Pemkot Makassar. Proposal yang masuk selanjutnya diverifikasi. Jika memenuhi syarat, maka akan mendapat bantuan,” ungkap Syarief saat ditemui di ruang kerjanya, pekan lalu.

Penyerahan dana hibah untuk masjid dilalukan selama bulan suci Ramadan ini. Secara simbolis, penyerahan dilakukan oleh pada pejabat mewakili Pemkot Makassar yang

melaksanakan Safari Ramadan di masjid-masjid. Setelah penyerahan secara simbolis dilakukan, pengurus masjid bersangkutan akan menghadap ke Bagian Kesra Kota Makassar untuk proses pencairannya.

Untuk penyerahan insentif bagi para pekerja keagamaan, akan dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini. Sementara tahap kedua akan dicairkan usai lebaran.

Menurut Syarief, nilai insentif yang akan diberikan bagi setiap pekerja keagamaan di luar para pemandi jenazah sebesar Rp1,5 juta, yang disalurkan dua kali. Jadi satu kali pencairan masing-masing menerima Rp750 ribu. Sementara untuk pemandi jenazah nilainya Rp1 juta per satu kali pencairan. Jadi total yang diterima para pemandi jenazah sebesar Rp2 juta.

Selain itu, momen Ramadan ini juga digunakan oleh seluruh OPD untuk melakukan kegiatan amaliah Ramadan. Setiap pegawai diminta mengeluarkan infaq untuk disalurkan ke orang-orang yang berhak menerima. Sasaran penyaluran infaq diantaranya satgas Dinas PU, Satgas Losari, dan beberapa kategori lainnya.

Untuk tahap pertama, infaq pegawai lingkup Pemkot Makassar disalurkan Jumat pekan lalu ke Satgas PU, Satgas Anjungan Losari, serta anak panti asuhan dan pengurus. Selanjutnya, pada Jumat 29 Maret mendatang akan disalurkan ke anak panti asuhan dan pengurus, anak stunting dan Bumil KEK, anak korban kekerasan, Satgas Dinas Lingkungan Hidup, dan Satgas Anjungan Losari.

Sementara pada Jumat, 5 April 2024, infaq akan disalurkan ke Satgas Kebersihan Kecamatan se- Kota Makassar, dan Satgas Anjungan Losari.

Kepala Dinas PU Makassar Zuhaelsi Zubir berharap santunan yang diterima para Satgas PU dapat membantu kebutuhan mereka menghadapi lebaran ini. Ia pun merinci untuk Bidang Jalan dan Jembatan ada 36 orang, Bidang Drainase 350 orang, Bidang Prasarana Bangunan Gedung 12 orang, dan UPT Perbengkelan 61 orang. “Mereka ini adalah tenaga Laskar Pelangi yang 24 jam standby membantu masyarakat,” kata Elsi.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengucapkan terima kasih kepada OPD yang telah secara sukarela memberikan infaq dan sedekah kepada anak yatim/kaum duafa. “Ini tradisi Pemkot Makassar, di mana satu pegawai memberikan infaq dan sedekahnya kepada satu anak yatim/kaum duafa,” ujarnya.

Tak hanya itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Ismawaty Nur, telah menyerahkan bantuan hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tahun 2024 sebesar 100 juta rupiah kepada Masjid Ihyatul Jamaah berlokasi di Lorong 1 Kelurahan Lembo.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar setiap tahunnya memberikan dana hibah kepada sejumlah masjid-masjid di kota Makassar yang diserahkan secara simbolis oleh seluruh SKPD Pemkot Makassar, termasuk Diskominfo.

Dalam suasana yang penuh kehangatan, Plt Kadiskominfo Ismawaty Nur didampingi Lurah Lembo, M. Armansyah Fernanada menyerahkan secara simbolis dana hibah tersebut kepada Ketua pengurus masjid, yang saksi oleh jamaah yang telah melaksanakan shalat Jumat pada 22 Maret 2024.

Dalam sambutannya, Plt Kadiskominfo Ismawaty Nur menyampaikan bahwa dana hibah ini merupakan bentuk kepedulian Wali Kota Makassar, Danny Pomanto bersama Pemkot Makassar terhadap masjid-masjid di Kota Makassar.

“Hari ini seluruh SKPD diamanahkan melalui bagian Kesra untuk dititipkan dana-dana ini kepada masjid-masjid di Kota Makassar yang membutuhkan dukungan keberlangsungan pembangunan,” ucapnya.

Ia pun berharap dana hibah tersebut dapat digunakan secara efisien dan transparan oleh pengurus masjid untuk kepentingan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta program-program keagamaan yang bermanfaat bagi umat Islam di sekitar wilayah Lorong 1 Kelurahan Lembo.

Ketua pengurus Masjid Ihyatul Jamaah, Dr. KH. Maskyur Yusuf, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Bantuan ini menjadi doa dari jamaah masjid agar pembangunan masjid dapat terus dilanjutkan sehingga jamaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman,” ucapnya.

Lanjutnya, melalui penyerahan bantuan hibah ini, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur keagamaan serta kesejahteraan umat Islam di Kota Makassar.

Penyerahan hibah ini menjadi momentum dalam memperkuat hubungan antara Pemkot Makassar dan masyarakat dalam upaya membangun nilai sosial dan keagamaan di Kota Makassar.

Sumber Berita:

1. <https://beritakotamakassar.com/berita/2024/03/25/pemkot-alokasikan-rp11-miliar/> 25 Maret 2024;
2. <https://radioalmarkaz.co.id/index.php/2024/03/23/dana-hibah-pemkot-makassar-dukungan-pembangunan-masjid/> 16 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62 yang menyatakan:
  - (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:
  - a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.

- b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
  - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
  - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
  - 1) besaran anggaran;
  - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
  - o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional Lanjutan Bendahara Pengeluaran atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD;
  - p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
  - q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
  - r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
  - s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
  - t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
    - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
    - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
    - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
    - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
  - u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
- a. Angka 9 yang menyatakan, “Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.”
  - b. Angka 10 yang menyatakan, “Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.”

- c. Angka 11 yang menyatakan, “Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.”
5. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 43 yang menyatakan
- a. Huruf e tentang Belanja Hibah
    - 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
    - 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 5) Belanja hibah diberikan kepada:
      - a) pemerintah pusat



- (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
  - (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
  - (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b) pemerintah daerah lainnya
- Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) BUMN
- Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d) BUMD;
- Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
    - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
  - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
  - (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, Yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

- (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- f) Partai Politik
- Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (3) partai politik dan/atau
    - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.